

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2016). Pergerakan ekonomi Banyuwangi selama beberapa tahun terakhir terutama dikontribusi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada Tahun 2019, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat 29,36 %. Kontribusi ini menunjukkan dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 1.1. menampilkan distribusi persentase PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyuwangi (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020). Sektor pertanian tidak hanya menjadi andalan di Kabupaten Banyuwangi, melainkan juga menjadi andalan di level Jawa Timur. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi melampaui Jawa Timur. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB total di Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu faktor penentu rata-rata angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi berada di atas angka rata-rata nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang menghidupi mayoritas penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pertanian (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2016).

Tabel 1.1. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Banyuwangi

Kategori	Uraian	Kontribusi PDRB ADHB (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,46	35,38	33,75	31,25	29,36
B	Pertambangan dan Penggalian	7,73	7,59	7,63	7,66	7,43
C	Industri Pengolahan	10,88	10,95	10,77	10,95	11,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	11,33	11,72	12,47	13,51	14,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,05	14,50	15,11	16,02	16,77
H	Transportasi dan Pergudangan	3,01	3,11	3,18	3,21	3,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,47	2,61	2,75	2,90
J	Informasi dan Komunikasi	4,01	4,03	4,10	4,14	4,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,78	1,77	1,77	1,73
L	Real Estate	1,49	1,46	1,47	1,50	1,52
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,22	0,23	0,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,25	2,27	2,24	2,18
P	Jasa Pendidikan	3,01	2,98	3,00	3,04	3,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,33	0,34	0,36	0,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,08	1,11	1,20	1,26	1,29
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, 2020

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terbagi dalam beberapa subsektor sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.2. Tabel tersebut menunjukkan kontribusi masing-masing subsektor terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi. Tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa sub sektor tanaman hortikultura tahunan yang didominasi tanaman buah memiliki share yang lebih besar dibandingkan tanaman hortikultura semusim yang banyak terdiri dari tanaman sayuran. Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan seri 2010 menurut subsektor di Kabupaten Banyuwangi ditampilkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.2. Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurut Sub Sektor di Kabupaten Banyuwangi

Kategori	Uraian	Kontribusi PDRB ADHB (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.46	35.38	33.75	31.25	29.36
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan	23.93	23.25	22.05	20.01	18.54
	a. Tanaman Pangan	8.03	7.58	7.13	6.41	5.66
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.35	0.41	0.42	0.42	0.41
	c. Perkebunan Semusim	1.19	1.11	1.00	0.96	0.91
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan	1.72	1.73	1.68	1.59	1.51
	e. Perkebunan Tahunan	9.25	9.10	8.62	7.63	7.17
	f. Peternakan	2.81	2.76	2.65	2.53	2.45
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.58	0.56	0.54	0.47	0.43
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.97	2.66	2.49	2.40	2.34
	3 Perikanan	9.56	9.47	9.21	8.85	8.48

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sub sektor hortikultura merupakan sub sektor yang secara konsisten mengalami pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Adapun sub sektor tanaman pangan sebagai salah satu sub sektor yang dominan di pertanian berdasarkan data Tabel 1.2, justru mengalami pertumbuhan yang negatif. Sub sektor dominan lainnya seperti perkebunan juga sempat berkontraksi hingga mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurut Sub Sektor di Kabupaten Banyuwangi

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.70	2.81	1.49	-0.73	-0.56
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.48	2.39	0.53	-1.91	-1.45
	a. Tanaman Pangan	3.1	1.02	0.15	-6.26	-6.78
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2.27	11.89	8.93	5.42	2.66
	c. Perkebunan Semusim	0.18	-3.06	-6.13	0.9	0.9
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan	4.46	7.11	0.74	0.55	0.64
	e. Perkebunan Tahunan	4.32	2.67	0.71	-0.16	0.67
	f. Peternakan	2.82	3.83	2.34	1.28	2.01
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	5.85	2.37	4	-8.61	-2.54
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.72	-6.32	0.82	0.87	2.15
	3 Perikanan	7.91	6.61	3.98	1.63	0.77

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan urusan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Urusan pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/Pd.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, sub sektor hortikultura memiliki jenis komoditas paling beragam dibandingkan dengan sub sektor tanaman lainnya, yakni sebanyak 323 jenis, terdiri dari 60 jenis komoditas buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 66 jenis komoditas biofarmaka dan 117 jenis komoditas tanaman hias.

Demikian halnya dengan kondisi di Kabupaten Banyuwangi, dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan agroklimat yang mendukung, maka beragam jenis komoditas hortikultura dapat tumbuh dengan baik di bumi blambangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, sub sektor hortikultura menjadi salah satu sub sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi. Budidaya tanaman hortikultura, khususnya buah-buahan menjanjikan keuntungan yang tinggi dengan terbuka lebarnya permintaan pasar, sehingga banyak diminati petani dan pelaku agribisnis di Kabupaten Banyuwangi.

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah berdasarkan pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi dan kelembagaan. Penentuan komoditas unggulan di suatu wilayah merupakan hal yang sangat penting karena ketersediaan dan kemampuan sumber daya alam, modal, dan sumberdaya manusia untuk memproduksi dan memasarkan semua komoditas yang dapat dihasilkan di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas (Naukoko, 2019).

Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan mengembangkan

komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, baik ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah (Hendayana, 2003).

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan Yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan. Perda tersebut berisi upaya dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pengembangan produk pertanian unggulan. Tujuan lahirnya regulasi tersebut adalah untuk mengoptimalkan pengembangan produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat mengingat Kabupaten Banyuwangi memiliki keanekaragaman agroklimat yang sangat potensial. Sebagai bentuk tindak lanjut, perlu dilakukan identifikasi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Banyuwangi agar implementasi kebijakan bidang pertanian dapat lebih efisien dan efektif. Identifikasi komoditas unggulan ini diharapkan menjadi bahan kajian pengusulan penerbitan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang penetapan komoditas buah unggulan di Kabupaten Banyuwangi.

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten yang diselenggarakan setiap tahun anggaran, masyarakat menyampaikan usulan mengenai program kegiatan pengembangan buah di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Beragamnya usulan pengembangan komoditas buah yang harus difasilitasi menuntut kejelian pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan anggaran yang terbatas agar secara optimal bermanfaat dalam mengakomodir usulan yang masuk. Belum dilakukannya studi akademik mengenai analisis komoditas buah unggulan menjadi salah satu penyebab kurang fokusnya pengalokasian anggaran Dinas Pertanian dan Pangan dalam fasilitasi program dan kegiatan peningkatan produksi dan kualitas produk hortikultura bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya, dalam kegiatan PPPM ini, penulis mengambil judul Identifikasi Komoditas Buah Unggulan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi ini adalah :

- a) Meningkatkan serta menambah ilmu dan pengetahuan penulis mengenai identifikasi komoditas buah unggulan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
- b) Mengaplikasikan keilmuan penulis yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, untuk mengidentifikasi komoditas buah unggulan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi ini adalah :

- a) Untuk mengidentifikasi komoditas buah unggulan di Kabupaten Banyuwangi dari aspek produksi
- b) Untuk mengidentifikasi komoditas buah unggulan di Kabupaten Banyuwangi dari aspek pendaftaran varietas

1.3 Manfaat dan Kompetensi

1.3.1 Manfaat

- a) Bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif sebagai instrumen kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Banyuwangi
- b) Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau acuan pemasaran serta promosi potensi produk pertanian

- c) Bagi petani dan pelaku agribisnis, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengusulan fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan komoditas unggulan di wilayah

1.3.2 Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta dalam kegiatan Praktik Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (PPPM) di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah pada bidang manajemen agribisnis. Berdasarkan ilmu yang telah dipelajari di kampus berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi terkait identifikasi komoditas buah unggulan, maka peserta magang mencoba menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan ilmu manajemen agribisnis.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan PPPM dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 80 Banyuwangi mulai Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020.